



**BUPATI WONOSOBO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

---

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 445/1/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro Wonosobo merupakan Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro yang selanjutnya disebut RSUD KRT Setjonegoro adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo.
6. Direktur adalah Direktur RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah/BLUD atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
9. Kelompok Kerja adalah Kelompok pada Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/BLUD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan oleh RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
12. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan fisik lainnya.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

## BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi;
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah, menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di RSUD KRT Setjonegoro dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dengan ketentuan terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - c. hibah tidak terikat; dan
  - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD KRT Setjonegoro.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.
- (2) Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

### Pasal 5

- (1) Fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa dan jasa lainnya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
  - b. pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pelelangan Sederhana;
  - c. pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
  - b. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pemilihan Langsung;
  - c. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pengadaan jasa konsultansi diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
  - b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana;
  - c. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Seleksi Umum.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Wonosobo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 8